

Keunggulan Komparatif dan Kompetitif dalam Produksi Padi di Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung

Comparative Advantage and Competitive in Paddy Production in Central Lampung Regency, Lampung

Zulkarnain, Dwi Haryono, Eka Kasymir

*Pascasarjana Magister Ekonomi Pertanian Universitas Lampung
Jln. Soemantri Brodjonegoro 1, Bandar Lampung 35145*

ABSTRACT

This objective of this research was to: 1) Determine whether the Central Lampung District has a comparative advantage and competitive advantage in rice production. 2) Determine how the sensitivity of changes in output prices and input prices to the comparative and competitive advantage in rice production. Location of the study was conducted at the Rama Utama Village and Ramayana Village, Seputih Raman Subdistrict of Central Lampung District. This research was conducted by survey and interview methods to farmers by using a questionnaire that had been prepared. Respondents in this research is rice farmer in the Seputih Raman subdistrict of Central Lampung District, totally 73 farmers were selected by simple random sampling method (simple random sampling). Types of data used are primary and secondary data obtained through direct interviews and offices or agencies. To answer the first objective analysis was used Policy Analysis Matrix (PAM) and to answer the second objective was used sensitivity analysis. Results showed that: 1) rice farming in Central Lampung District has a comparative advantage and competitive advantage with a value of PCR (Private Cost Ratio) equal to 0.4635 and the value of the DRC (Domestic Resource Cost) of 0.4368 so that feasible and profitable to be conducted. 2) comparative and competitive advantage of rice production in Central Lampung District is sensitive to changes in output prices. Increase or decrease of output prices will affect the comparative and competitive advantage of rice production in Central Lampung District.

Keywords: Comparative Advantage, Competitive, Paddy Production

Diterima: 26-08-2010, disetujui: 03-09-2010

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara agraris, sehingga pembangunan yang dilakukan sekarang ini lebih dititikberatkan pada pembangunan ekonomi dengan prioritas pembangunan pertanian. Menurut Arifin (2003) tujuan pembangunan pertanian yaitu (1) pertumbuhan pertanian; pertumbuhan pertanian dapat menaikkan pendapatan usahatani, memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa non-pangan, (2) pengentasan kemiskinan; dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan membaiknya diversifikasi ekonomi di pedesaan maka pola pembangunan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kehidupan masyarakat, terutama di daerah pedesaan karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian di bidang pertanian, dan (3) keberlanjutan lingkungan hidup.

Dalam struktur perekonomian Indonesia, sektor pertanian menempati posisi yang strategis dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, hal ini dibuktikan dari perannya dalam menyerap tenaga kerja dan kontribusinya terhadap produk domestik bruto. Strategisnya sektor pertanian dalam pembangunan juga telah dituangkan dalam RJPM yaitu pembangunan pertanian diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah ekonomi nasional seperti penyediaan pangan, penyediaan bahan baku industri, peningkatan penerimaan devisa, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat tani.

Sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam pembangunan daerah di Propinsi Lampung. Berdasarkan data PDRB Propinsi Lampung menurut lapangan usaha, menunjukkan bahwa struktur perekonomian daerah Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian (Tabel 1). Kontribusi sektor pertanian dalam PDRB masih berada di urutan teratas dengan persentasi sebesar 38,63 % pada tahun 2008.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Lampung atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (Juta Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2006	%	2007	%	2008	%
1.	Pertanian,perternakan, kehutanan, perikanan	18.166.620	36,98	22.732.966	37,31	28.773.832.	38.63
2.	Pertambangan & penggalian	2.152.284	4,38	2.190.112	3,59	2.306.687	3.10
3.	Industri pengolahan	6146.604	12,51	8.313.988	13,65	9.726.559	13.06
4.	Listrik dan air bersih	360.463	0,73	401.210	0,66	441.550	0.59
5.	Bangunan	2.650.103	5,40	3.079.057	5,05	3.278.268	4.40
6.	Perdagangan, restoran dan hotel	7.573.095	15,42	8.714.733	14,30	10.158.964	13.64
7.	Angkutan dan komunikasi	3.813.854	7,76	5.094.877	8,36	6.660.142	8.94
8.	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	2.968.016	6,04	3.665.182	6,02	4.772.937	6.41
9.	Jasa-jasa	5.287.950	10,77	6.729.840	11,05	8.371.659	11.24
	PDRB	49.118.989	100	60.921.966	100	74.490.599	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung, 2009

Sejak tahun 2006 - 2008, sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB Propinsi Lampung terus meningkat. Besarnya peningkatan kontribusi sektor pertanian tersebut tidak terlepas dari dukungan setiap subsektor yang terdapat dalam bidang pertanian yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman perkebunan, subsektor perternakan, subsektor kehutanan, subsektor perikanan. Dari kelima subsektor tersebut, subsektor tanaman pangan memegang peranan penting dalam perekonomian Negara dan juga perekonomian rakyat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.

Adapun jenis tanaman pangan yang terus ditingkatkan produksinya guna menunjang kebutuhan pangan nasional adalah padi, jagung, kedelai, ubi kayu, kacang tanah, dan kacang hijau. Padi merupakan salah satu komoditi pangan yang sangat penting, hal ini dikarenakan masyarakat masih ketergantungan yang berlebihan terhadap satu jenis makanan saja yaitu beras. Kebutuhan terhadap beras terus meningkat setiap tahunnya, hal tersebut disebabkan meningkatnya jumlah penduduk dan terjadinya peralihan pola konsumsi ke beras sehingga berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah produksi padi di Indonesia (Departemen Pertanian, 2005)

Jumlah penduduk yang terus bertambah membuat kebutuhan akan beras juga terus meningkat. Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi beras adalah peningkatan produktivitas lahan dengan menggunakan sarana produksi secara intensif (Haryono *et al.*, 1999). Propinsi Lampung mempunyai laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan propinsi-propinsi lain. Pada tahun 2008 jumlah penduduk Lampung mencapai 7.391.128 jiwa (BPS Provinsi Lampung, 2009), hal ini patut dipertimbangkan karena peningkatan jumlah penduduk akan berpengaruh besar pada permintaan beras. Selain itu, makin membaiknya pendapatan per kapita penduduk di Propinsi Lampung akan mengakibatkan permintaan beras meningkat pesat terutama daerah-daerah yang konsumsi berasnya rendah karena daya beli masyarakatnya yang rendah.

Semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian di Jawa membuat daerah di luar Jawa semakin penting untuk diperhatikan sebagai kompensasi perubahan tersebut, terutama Lampung. Hal ini mengingat Lampung merupakan salah satu daerah penerima transmigrasi utama di Indonesia yang sebagian besar berasal dari Jawa, keadaan ini membawa implikasi bahwa teknik dan budaya dalam budidaya padi tidak jauh berbeda dengan Jawa. Kondisi geografis, ekologi, ekonomis, dan kelembagaan mempengaruhi perilaku produksi beras baik padi ladang maupun padi sawah (Cahyono, 2001).

Konversi lahan tersebut antara lain karena tingginya permintaan lahan untuk kawasan industri, permukiman, transportasi dan sebagainya sehingga semakin meningkatnya konversi lahan pertanian ke non pertanian yang mengurangi lahan sawah. Upaya pengendalian konversi lahan sawah memiliki peranan yang semakin penting dalam rangka mendukung ketahanan pangan (Irawan, 2002).

Subsidi input yang berkurang-pun berpengaruh terhadap lambatnya produksi beras. Subsidi input dimaksudkan untuk mengurangi biaya produksi dan merangsang penggunaan input sehingga meningkatkan produksi dan pendapatan petani (Adji, 1992, dalam Cahyono, 2001).

Dengan adanya pengurangan subsidi input akan berpengaruh terhadap produksi dan pendapatan petani, karena akan mendorong petani untuk mengurangi penggunaan pupuk menjadi di bawah rekomendasi sehingga produksi beras menjadi lambat. Selain itu, dana operasi irigasi yang berkurang dan faktor alam seperti kemarau, serangan hama dan penyakit tanaman, dan lain-lain juga berpengaruh terhadap peningkatan produksi beras yang lambat.

Kebijakan pemerintah untuk membantu petani dalam memperbaiki harga jual gabah yaitu dengan cara adanya kebijakan harga. Peningkatan produksi yang tanpa diikuti oleh kenaikan harga jual produk yang bersangkutan, tidak akan menjamin tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen.

Untuk itu, kebijakan penetapan harga dasar harus tetap terus diupayakan penyempurnaannya dengan formula yang mampu memberikan insentif kepada petani untuk senantiasa berupaya meningkatkan produksinya.

Pada tahun 2009, presiden mengeluarkan inpres No. 7 tahun 2009 tentang kebijakan perberasan yang mengenai pembelian gabah/beras dalam negeri dan kebijakan ekspor dan impor beras secara terkendali dalam menjaga kepentingan petani dan konsumen. Menurut Inpres No. 7 tahun 2009, HPP Gabah Kering Panen (GKP) sebesar Rp 2.640,00/kg di petani atau Rp 2.685,00/kg di penggilingan dan Gabah Kering Giling (GKG) sebesar Rp 3.300,00/kg di penggilingan atau Rp 3.345,00/kg di gudang Bulog.

Peningkatan harga gabah petani merupakan suatu hal yang dapat merangsang petani untuk meningkatkan produksinya (Solahuddin, 1998). Selain peningkatan harga gabah petani, pemberian subsidi pupuk merupakan salah satu komponen yang penting dalam peningkatan produksi padi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas padi, antara lain dengan bentuk subsidi input, introduksi varietas unggul, perlindungan harga, penyuluhan dan pembangunan berbagai fasilitas penunjuang. Namun upaya-upaya tersebut tampaknya belum membuahkan hasil yang memuaskan, sementara itu permintaan terhadap komoditas padi untuk konsumsi di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Walaupun produksi komoditas padi tersebut juga terus mengalami peningkatan, tetapi peningkatannya tidak mampu mengikuti peningkatan konsumsinya.

Apabila dilihat dari segi pemenuhan permintaan dalam negeri, sebenarnya tidak perlu dirisaukan apakah permintaan tersebut dipenuhi oleh produksi dalam negeri atau impor (Suryana, 1980 dalam Haryono, 1991). Namun demikian, impor suatu komoditi merupakan salah satu sumber pengurusan devisa negara yang tidak sedikit. Padahal bagi Indonesia yang sedang melaksanakan pembangunan ekonomi, devisa merupakan sesuatu yang langka. Oleh karena itu, penggunaan devisa negara perlu seefisien mungkin (Haryono, 1991)

Oleh karena itu, perlu diketahui apakah Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam produksi padi melalui analisis PAM dan apakah ada kepekaan dalam perubahan harga output dan harga input terhadap keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam produksi padi melalui analisis sensitivitas.

Tujuan penelitian ini adalah: Mengetahui apakah Kabupaten Lampung Tengah memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam produksi padi serta mengetahui bagaimana kepekaan perubahan harga output dan harga input terhadap keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam produksi padi.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Lampung Tengah merupakan sentra produksi padi dan memiliki kontribusi produksi padi terbesar di Propinsi Lampung. Selain itu, daerah ini memiliki lahan sawah dengan aliran irigasi teknis yang mendukung dalam usahatani padi.

Responden dalam penelitian ini adalah petani padi sawah. Pengambilan jumlah sampel usahatani tersebut didapatkan berdasarkan perhitungan (Sugiarto *et al*, 2003), dengan metode acak sederhana (*simple random sampling*) didapat jumlah sampel sebanyak 73 petani dari total populasi yang berjumlah 1.538 petani (Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Lampung Tengah)

yang terdiri dari 809 petani di Desa Rama Utama dan 729 petani di Desa Ramayana, dari jumlah populasi petani tersebut tersebar di dua desa yaitu Desa Rama Utama yang berjumlah 38 petani dan Desa Ramayana berjumlah yang 35 petani.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan petani dengan menggunakan kuesioner dan data sekunder diperoleh melalui Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Propinsi Lampung, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung, penelitian sejenis, dan instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian ini.

Analisis Data

PAM (*Policy Analysis Matrix*)

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAM (*Policy Analysis Matrix*). Dengan Analisis PAM, kita dapat mengetahui keuntungan finansial, keuntungan ekonomi, dan dampak kebijakan pemerintah terhadap output, input, input-output, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang merupakan indikator keunggulan komparatif dan kompetitif. Untuk mengukur elastisitas nilai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif maka digunakan alat analisis sensitivitas. Alat analisis ini mengukur tingkat kepekaan nilai keunggulan kompetitif (PCR) dan keunggulan komparatif (DRC) terhadap perubahan harga output dan harga input.

Tabel 8. Analisis PAM (*Policy Analysis Matrix*)

	Penerimaan Output	Biaya		Keuntungan
		Input Tradable	Input Non Tradable	
Harga Privat	A	B	C	D
Harga Sosial	E	F	G	H
Dampak Kebijakan	I	J	K	L

Sumber : Monke dan Pearson, 1995

Keterangan :

<i>Keuntungan Finansial</i>	(D)	= A-(B+C)
<i>Keuntungan Ekonomi</i>	(H)	= E-(F+G)
<i>Transfer Output (OT)</i>	(I)	= A-E
<i>Transfer Input Tradable (IT)</i>	(J)	= B-F
<i>Transfer Faktor non Tradable (FT)</i>	(K)	= C-G
<i>Transfer Bersih (NT)</i>	(L)	= D-H
<i>Rasio Biaya Privat (PCR)</i>		= C/(A-B)
<i>Rasio BSD (DRC)</i>		= G/(E-F)
<i>Koefisien Proteksi Output Nominal (NCPO)</i>		= A/E
<i>Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI)</i>		= B/F
<i>Koefisien Proteksi Efektif (EPC)</i>		= (A-B)/(E-F)
<i>Koefisien Keuntungan (PC)</i>		= D/H
<i>Rasio Subsidi Bagi Produsen</i>		= L/E

Analisis keuntungan finansial dan keuntungan ekonomi

Keuntungan Finansial/Finance Profitability (FP); $D = A-(B+C)$. Keuntungan finansial merupakan indikator daya saing dari sistem komoditas berdasarkan teknologi, nilai output, biaya input

dan transfer kebijakan yang ada. Jika $D > 0$, maka secara finansial kegiatan usahatani tersebut layak untuk diteruskan.

Keuntungan Ekonomi/Economic Profitability (EP); $H = E - (F + G)$. Keuntungan ekonomi merupakan indikator keunggulan komperatif atau efisiensi dari sistem komoditas pada kondisi tidak ada penyimpangan dan penerapan kebijakan efisien. Jika $H > 0$, maka sistem komoditi makin efisien dan mempunyai keunggulan komparatif yang tinggi. Jika $H < 0$, maka sistem komoditas tidak mampu hidup tanpa bantuan atau intervensi pemerintah.

Analisis keunggulan kompetitif (PCR) dan keunggulan komperatif (DRC)

Private Cost Ratio (PCR); $PCR = C / (A - B)$. PCR menunjukkan kemampuan sistem komoditi membiayai faktor domestik pada harga privat. Jika $PCR < 1$, maka sistem komoditas tersebut mampu membiayai faktor domestiknya pada harga privat dan mempunyai keunggulan kompetitif.

Domestic Resource Cost Ratio (DCR); $DCR = G / (E - F)$. Nilai DRC merupakan indikator kemampuan sistem komoditi membiayai faktor domestik pada harga sosial. Jika $DCR > 1$, maka sistem komoditi tersebut tidak mampu hidup tanpa bantuan atau intervensi pemerintah. Jika $DCR < 1$, maka sistem komoditi makin efisien, mempunyai daya saing yang tinggi, mampu hidup tanpa bantuan dan intervensi pemerintah, dan mempunyai peluang ekspor yang besar, sehingga dapat dikatakan mempunyai keunggulan kompetitif.

Analisis dampak kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah terhadap output

Output Transfer (OT); $OT = A - E$. Transfer output merupakan selisih antara penerimaan yang dihitung atas harga privat dengan penerimaan yang dihitung berdasarkan harga sosial. Jika OT positif, maka besarnya transfer (insentif) dari masyarakat (konsumen) terhadap produsen, sehingga masyarakat membeli dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang seharusnya.

Nominal Protection coefficient on tradeable output (NPCO); $NPCO = A / E$. Koefisien proteksi output nominal merupakan rasio penerimaan yang dihitung berdasarkan harga privat dengan penerimaan yang dihitung dengan harga sosial. Jika $NPCO > 1$, maka terdapat kebijakan pemerintah yang menyebabkan harga pasar lebih besar daripada harga sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kebijakan pemerintah yang membatasi impor output atau berupa tarif impor.

Kebijakan pemerintah terhadap input

Transfer Input (IT); $IT = B - F$. Transfer input adalah selisih antara biaya input yang dapat diperdagangkan pada harga privat dengan biaya input yang dapat diperdagangkan pada harga sosial. Nilai IT bertanda positif menunjukkan bahwa besarnya transfer (insentif) dari produsen kepada pemerintah melalui kebijakan tarif impor.

Nominal Protection Coefficient on Tradeable Input (NPCI); $NPCI = B / F$. Koefisien input proteksi nominal merupakan rasio antara biaya input tradable yang dihitung berdasarkan harga finansial dengan biaya *input tradable* yang dihitung berdasarkan harga bayangan. Jika $NPCI > 1$, maka adanya proteksi terhadap produsen input sehingga harga input menjadi lebih mahal dan akan merugikan sektor yang menggunakan input tersebut. Jika $NPCI < 1$, maka adanya hambatan ekspor input sehingga proses produksi dilakukan dengan menggunakan input dalam negeri atau adanya insentif pemerintah terhadap produsen.

Transfer Factor (FT); $FT = C - G$. Transfer faktor merupakan nilai yang menunjukkan perbedaan harga finansial dengan harga ekonomi yang diterima produsen untuk pembayaran faktor

produksi domestik. Nilai FT menunjukkan bahwa adanya pengaruh kebijakan pemerintah terhadap produsen dan konsumen yang diterapkan pada input domestik. Kebijakan pemerintah pada input domestik dilakukan dalam bentuk kebijakan subsidi.

Kebijakan pemerintah terhadap input output

Effective Protection Coefficient (EPC); $EPC = (A-B)/(E-F)$. Koefisien proteksi efektif merupakan analisis gabungan antara koefisien output nominal dengan koefisien input nominal. Nilai EPC menggambarkan dampak kebijakan pemerintah apakah bersifat melindungi atau menghambat produksi domestik. Jika $EPC > 1$, maka menunjukkan bahwa keuntungan finansial lebih besar daripada tanpa kebijakan yang berarti kebijakan yang ada memberikan insentif untuk berproduksi.

Net Transfer (NT); $NT = D-H$. Transfer bersih merupakan selisih antara keuntungan bersih yang benar-benar diterima produsen dengan keuntungan bersih ekonominya. Jika $NT > 0$, maka tambahan surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang diterapkan pada input dan output, sebaliknya jika $NT < 0$.

Profitability Coefficient (PC); $PC = D/H$. Koefisien keuntungan adalah perbandingan antara keuntungan bersih finansial petani dengan keuntungan bersih ekonominya. Jika $PC > 1$, maka kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada produsen. Jika $PC < 1$, maka kebijakan pemerintah membuat keuntungan yang diterima produsen lebih kecil dibandingkan tanpa adanya kebijakan, sehingga produsen harus mengeluarkan sejumlah dana kepada konsumen.

Subsidy Ratio to Producers (SRP); $SRP = L/E$. Rasio subsidi produsen menunjukkan persentase subsidi atau insentif bersih atas penerimaan yang dihitung dengan harga bayangan. Jika $SRP > 1$, maka kebijakan pemerintah berupa subsidi selama ini menyebabkan produsen mengeluarkan biaya produksi lebih kecil dari biaya imbalan untuk berproduksi.

Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas digunakan untuk melihat dampak alternatif kebijakan dalam sistem komoditas. Analisis sensitivitas bertujuan untuk melihat bagaimana perubahan hasil analisis suatu kegiatan ekonomi, bila ada kesalahan dalam perhitungan biaya atau manfaat. Menurut Kadariah, et al (1978) analisis sensitivitas dilakukan dengan cara, yaitu; (1) Mengubah besarnya variabel-variabel yang penting, masing-masing terpisah atau beberapa dalam kombinasi dengan suatu persentase dan menentukan tingkat kepekaan hasil perhitungan terhadap perubahan-perubahan tersebut.. (2) Menentukan sampai berapa suatu variabel harus berubah sampai ke hasil perhitungan dimana proyek tersebut tidak diterima.

Menurut Haryono (1991), perhitungan elastisitas PCR dan elastisitas DRC yaitu;

$$\text{Elastisitas PCR} = \frac{\Delta \text{PCR}}{\text{PCR}} \cdot \frac{\Delta X_i}{X_i}$$

$$\text{Elastisitas DRC} = \frac{\Delta \text{DRC}}{\text{DRC}} \cdot \frac{\Delta X_i}{X_i}$$

Dimana, X_i adalah parameter yang diuji

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan harga privat dan harga sosial

Pada tabel PAM terdiri dari tiga baris yaitu baris pertama berisi tentang perhitungan analisis finansial, baris kedua tentang analisis ekonomi, dan baris ketiga berisi efek divergensi. Dalam analisis

finansial digunakan harga privat (*private price*) sedangkan analisis ekonomi digunakan harga sosial (*social price*)

Harga privat (private price) dan harga sosial (social price) output

Harga privat yaitu harga yang benar-benar terjadi atau yang diterima petani pada saat menjual output. Harga output rata-rata yang diterima petani yaitu sebesar Rp 2.468,49/kg. Harga sosial adalah harga pada pasar persaingan sempurna yang mewakili biaya imbang sosial. Dalam hal ini harga sosial output berupa gabah kering panen (GKP) yaitu sebesar Rp 2.692,81/kg. Harga tersebut diperoleh dari harga yang berlaku pada pasar internasional atau free on board (FOB) dengan harga FOB beras Thailand dengan kadar pecah 25%, yaitu sebesar 458,10 US\$/ton (*Commodity Price Data*) ditambah dengan biaya pengapalan dan asuransi sebesar 28,92 US \$/ton kemudian dikalikan dengan harga sosial nilai tukar rupiah sebesar Rp 10.383 /US \$ (*Shadow Exchange Rate*). Berdasarkan dari perhitungan tersebut didapatkan harga CIF dalam mata uang domestik sebesar Rp 5.056,73/kg, kemudian ditambahkan dengan biaya bongkar muat, susut dan lain-lain sebesar 5 % dari CIF sebesar Rp 252,84 dan biaya transportasi ke propinsi sebesar Rp 10/kg. Nilai tersebut dikonversikan ke GKG sebesar 65% dan ke GKP sebesar 85 % (Pearson *et al.*, 2005) dan ditambah biaya pengilingan bersih sebesar Rp 225,00/kg. sehingga didapatkan harga paritas ekspor di pedagang besar Rp 2.692,81/kg, untuk mendapatkan harga paritas ekspor di tingkat petani, maka harga paritas ekspor pedagang besar dikurangi biaya distribusi ke tingkat petani sebesar Rp 55/kg.

Harga privat (private price) dan harga sosial (social price) input

Harga privat benih rata-rata yang berlaku di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp 9.013,70/kg. Untuk harga sosial benih sama dengan harga privatnya. Harga privat pupuk Urea, TSP, dan pupuk kandang yang digunakan adalah harga rata-rata yaitu Rp 1.646,58/kg, Rp 2.128,77/kg, Rp 9.635,71/kg dan Rp 275,00/kg. Harga sosial pupuk urea diperoleh dari FOB pupuk urea yaitu sebesar 249,60 US\$/ton (*Commodity Price Data*) dikalikan dengan harga sosial nilai tukar mata uang menjadi Rp 10.383,00 / US \$ (*Shadow Exchange Rate*) kemudian ditambah dengan biaya bongkar muat, gudang, penyusutan, dan lain-lain sebesar 5% dari FOB sebesar Rp 129,58/kg dan biaya transportasi Rp 10/kg. Hasil tersebut dikurangi dengan biaya distribusi ke tingkat petani sebesar Rp 55/kg. Berdasarkan perhitungan tersebut maka didapatkan harga sosial pupuk urea sebesar Rp 2.786,18/kg.

Harga sosial TSP diperoleh dari hasil perkalian antara harga CIF yaitu 257,40 US\$/ton (*Commodity Price Data*) dengan harga sosial nilai tukar rupiah sebesar Rp 10.383,00 /US \$ (*Shadow Exchange Rate*) ditambah dengan biaya bongkar muat, gudang, penyusutan sebesar 5 % dari nilai FOB sebesar Rp 133,63/kg dan biaya transportasi Rp 10/kg kemudian ditambah dengan biaya distribusi ke tingkat petani sebesar Rp 55/kg. Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh harga sosial pupuk TSP yaitu sebesar Rp 2.871,21/kg.

Harga sosial KCL diperoleh dari hasil perkalian antara harga CIF yaitu 630,40 US\$/ton (*Commodity Price Data*) dengan harga sosial nilai tukar rupiah sebesar Rp 10.383,00 / US \$ (*Shadow Exchange Rate*) ditambah dengan biaya bongkar muat, gudang, penyusutan sebesar 5 % dari nilai FOB sebesar Rp 327,27/kg dan biaya transportasi Rp 10/kg kemudian ditambah dengan biaya distribusi ke tingkat petani sebesar Rp 55/kg. Berdasarkan perhitungan tersebut maka diperoleh harga sosial pupuk KCL yaitu sebesar Rp 6.937,72/kg.

Harga sosial obat-obatan sama dengan harga privatnya, hal ini dikarenakan subsidi yang diberikan pemerintah untuk obat-obatan/pestisida telah dicabut pada tahun 1986 (Keppres No. 2 tahun

1986) dan diasumsikan bahwa mekanisme pasar yang terjadi adalah pasar bebas. Harga privat peralatan sama dengan harga sosial yaitu berdasarkan nilai penyusutan. Hal tersebut dikarenakan tidak ada kebijakan pemerintah yang secara langsung mengatur harga peralatan.

Pasar tenaga kerja di Indonesia terutama tenaga kerja tak terdidik (*unskilled*), tingkat upah yang diberikan sering kali melebihi biaya imbalan. Harga sosial tenaga kerja sama dengan harga privat tenaga yang digunakan di daerah penelitian. Hal ini dikarenakan bahwa mekanisme pasar tenaga kerja di sentra-sentra produksi padi yang umumnya mempunyai aksesibilitas yang sangat baik dalam mendorong berjalannya pasar tenaga kerja di pedesaan.

Gittinger (1986), penilaian harga sosial lahan dapat berupa nilai sewa aktual, harga beli dan pendapatan dari tanah untuk tanaman alternatif terbaik. Dalam penelitian ini, penentuan harga bayangan tanah berdasarkan harga rata-rata aktual sewa lahan. Harga bayangan lahan diasumsikan sama dengan harga aktual pada daerah penelitian, yaitu sebesar Rp 3.000.000,00/tahun/ha atau Rp1.500.000,00/musim/ha.

Harga sosial nilai tukar adalah harga uang domestik dalam kaitannya dengan mata uang asing yang terjadi pada pasar nilai tukar uang yang bersaing sempurna. Menurut Squire *et al.* dalam Haryono, 1991, menentukan harga sosial nilai tukar dengan formula berikut:

$$SER = \frac{OER}{SCF}$$

Keterangan:

- SER = Shadow Exchange Rate (nilai tukar bayangan)
 OER = Official Exchange Rate (nilai tukar resmi)
 SCF = Standard Conversion Factor (faktor konversi standar)

Sedangkan menurut Rosegrant *et al* dalam Haryono, 1991, menentukan nilai SCF (faktor konversi standar) dengan formula berikut:

$$SCF = \frac{M + X}{(M + T_m) + (X - T_x)}$$

Keterangan :

- M = Nilai impor (Rp) T_m = Pajak impor (Rp)
 X = Nilai ekspor (Rp) SCF = Faktor Konversi Baku
 T_x = Pajak ekspor (Rp)

Nilai ekspor indonesia pada tahun 2009 sebesar Rp 1.200.053.268.634.300,00 sedangkan nilai impor tahun 2009 sebesar Rp 997.341.223.304.300,00 (www.bps.go.id). Pajak ekspor indonesia pada tahun 2009 sebesar Rp 9.300.000.000.000,00 sedangkan pajak impor tahun 2009 sebesar Rp 19.200.000.000.000,00 (Nota Keuangan dan APBN). Rata-rata nilai tukar Dollar Amerika terhadap Rupiah pada tahun 2009 sebesar Rp 10.300 (www.bi.go.id). Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh angka konversi baku (SCF) sebesar 0,992. Sehingga harga bayangan nilai tukar mata uang (SER) adalah Rp 10.383 /US \$.

Harga sosial bunga modal adalah tingkat bunga tertentu atau tingkat pengembalian riil atas proyek-proyek pemerintah. Tingkat bunga modal ini diperlukan dalam menghitung biaya tunai yang dikeluarkan dalam proses produksi (Suryana, 1980). Dalam perhitungan, besarnya bunga modal dihitung berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku di daerah penelitian. Departemen Pertanian bersama dengan 6 perbankan memberikan pinjaman kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K untuk

sektor pertanian yang berupa KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan tingkat suku bunga sebesar 16% per tahun dan sebagai penyalur di daerah penelitian tersebut dilakukan oleh BRI (Bank Rakyat Indonesia) sehingga tingkat suku bunga privat dalam penelitian ini ditetapkan sebesar 16% per tahun. Harga sosial bunga modal dalam penelitian ini diperoleh dari tingkat suku bunga privat ditambah dengan rata-rata tingkat inflasi tahun 2010 sebesar 4,16% (www.bi.go.id) sehingga diperoleh harga sosial bunga modal sebesar 20,16% per tahun atau 10,08 % per musim.

Analisis Policy Analisis Matrix (PAM)

Perhitungan analisis keuntungan finansial dan keuntungan ekonomi disusun berdasarkan data penerimaan dan seluruh biaya usahatani yang dibagi dalam dua bagian yaitu harga privat dan harga sosial. Nilai penerimaan dan seluruh biaya usahatani tersebut kemudian dihitung ke dalam biaya privat dan sosial, selanjutnya dialokasikan ke dalam komponen *tradeable* dan *non tradeable*. Berdasarkan perhitungan, maka dapat disusun Matrik Analisis Kebijakan seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Matrik Analisis Kebijakan usahatani padi di Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah

Uraian	Penerimaan	Biaya		Keuntungan
		Tradeabel	Non Tradeabel	
Harga privat	14.635.626,68	2.952.323,05	5.414.813,07	6.268.490,55
Harga sosial	15.965.593,29	3.226.712,28	5.564.253,48	7.174.627,53
Divergensi	(1.329.966,61)	(274.389,23)	(149.440,40)	(906.136,98)

Keterangan : (...) bernilai negatif

Analisis keuntungan finansial dan keuntungan ekonomi

Keuntungan Finansial / Finance Profitability. Keuntungan finansial sebesar Rp 6.268.490,55. Jika $D > 0$, maka secara finansial kegiatan usahatani tersebut layak untuk diteruskan.

Keuntungan Ekonomi / Economic Profitability. Keuntungan ekonomi sebesar Rp 7.174.627,53. Jika $H > 0$, maka sistem komoditi makin efisien dan mempunyai keunggulan komparatif yang tinggi.

Analisis keunggulan kompetitif (PCR) dan keunggulan komperatif (DRC)

Nilai PCR sebesar 0,4635. Nilai tersebut menunjukkan kemampuan sistem komoditi membiayai faktor domestik pada harga privat. Jika $PCR < 1$, maka sistem komoditas tersebut mampu membiayai faktor domestiknya pada harga privat dan mempunyai keunggulan kompetitif.

Nilai DRC sebesar 0,4368. Nilai tersebut menunjukkan kemampuan sistem komoditi membiayai faktor domestik pada harga sosial. Jika $DCR < 1$, maka sistem komoditi makin efisien, mempunyai daya saing yang tinggi, mampu hidup tanpa bantuan dan intervensi pemerintah, dan mempunyai peluang ekspor yang besar, sehingga dapat dikatakan mempunyai keunggulan kompetitif.

Analisis dampak kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah terhadap output

Output Transfer (OT); $OT = A - E$. Transfer Output bernilai negatif yaitu sebesar 1.329.966,61 yang berarti kebijakan perdagangan pemerintah menguntungkan konsumen dengan terjadinya pengalihan atau transfer dari produsen ke konsumen. Dengan kata lain, petani padi kehilangan keuntungan sebesar Rp 1.329.966,61 per hektar tanaman padi. Nilai Transfer Output negatif tersebut menunjukkan bahwa harga privat output lebih rendah dibandingkan harga sosialnya, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat distorsi pasar atau kegagalan pasar. Penyebab terjadinya kegagalan

pasar yaitu adanya jumlah penjual yang banyak dibandingkan dengan jumlah pembeli dan tidak adanya lembaga yang menampung hasil produksi sehingga harga jual petani kecil. Dengan adanya lembaga yang dapat menghubungkan petani dengan Buloq, diharapkan dapat meningkatkan harga jual petani.

Nominal Protection coefficient on tradeable output (NPCO); $NPCO = A/E$. Nilai NPCO usahatani padi di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sebesar 0,9167. Hal ini menunjukkan tidak efektifnya kebijakan proteksi harga yang dilakukan pemerintah terhadap harga output sehingga petani hanya menerima 91,67 persen dari harga yang seharusnya dibayar konsumen. Dengan kata lain, petani tidak menerima insentif yang diberikan pemerintah.

Kebijakan pemerintah terhadap input

Transfer Input (IT). Nilai Transfer Input bernilai negatif yaitu sebesar Rp -274.389,23. Nilai IT tersebut menunjukkan bahwa petani membayar *input tradeable* dengan harga yang lebih rendah Rp 274.389,23 dari jumlah biaya yang seharusnya dibayar oleh petani, dengan kata lain adanya subsidi pemerintah terhadap input tradeable, sehingga petani tidak membayar penuh korbanan sosial yang seharusnya dibayar.

Nominal Protection Coefficient on Tradeable Input (NPCI); $NPC = B/F$. Kebijakan bersifat protektif terhadap *input*. Jika nilai NPCI < 1 berarti ada kebijakan subsidi terhadap *input tradeable*. Nilai NPCI usahatani padi di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah kurang dari satu yaitu 0,9150. Nilai tersebut berarti harga input yang benar-benar dikeluarkan petani sebesar 91,50 % dari harga sesungguhnya, dengan kata lain ada kebijakan subsidi terhadap *input tradeable* sebesar 8,5 persen

Transfer Factor (FT). Nilai Transfer Faktor merupakan selisih antara biaya produksi domestik yang dihitung pada harga privat dengan biaya produksi domestik yang dihitung pada harga sosial yang diterima oleh produsen untuk pembayaran faktor produksi yang tidak diperdagangkan (input domestik). Nilai Transfer Faktor menunjukkan nilai yang negatif yaitu -149.440,40. Berdasarkan nilai tersebut, petani membayar Rp 149.440,40 lebih rendah dari harga yang seharusnya dibayar pada input domestik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada transfer dari petani kepada produsen *input non tradable*.

Kebijakan pemerintah terhadap input output

Effetive Protection Coefficient (EPC). Nilai Koefisien Proteksi Efektif (EPC) pada usahatani padi sebesar 0,9171 hal ini menunjukkan bahwa harga output dan harga input *tradeable* yang diterima petani hanya sebesar 91,71 persen dari harga yang seharusnya (harga sosial), atau nilai tambah yang dinikmati petani secara aktual lebih kecil dari nilai tambah secara sosial atau yang seharusnya diterima apabila tidak terjadi distorsi kebijakan. Nilai EPC tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang berupa insentif harga gabah dalam bentuk HPP dan subsidi pupuk pada petani dalam bentuk harga eceran tertinggi (HET) tidak memberikan keuntungan secara nyata bagi petani untuk memproduksi. Insentif harga yang diberikan petani secara nyata tidak dirasakan petani terlebih pada musim panen raya, hal ini terlihat dengan rendahnya harga jual gabah dan kelangkaan harga pupuk membuat tingginya harga.

Net Transfer (NT). Transfer Bersih bernilai negatif yaitu - 906.136,98. Hal ini berarti petani padi kehilangan keuntungan sebesar Rp 906.136,98 per hektar. Keadaan ini terjadi diakibatkan oleh harga privat lebih rendah dari harga sosial dan harga penetapan pemerintah, sehingga petani kehilangan keuntungan yang seharusnya diterima dalam jumlah besar.

Profitability Coefficient (PC). Nilai PC sebesar 0,8737 yang artinya keuntungan yang diterima oleh petani padi hanya sebesar 87,37% dari keuntungan sosial. Nilai PC kurang dari satu mengindikasikan bahwa tidak terdapat kebijakan pemerintah yang merangsang untuk peningkatan produksi dan produktivitas pada petani padi.

Subsidy Ratio to Producers (SRP). Nilai SRP usahatani padi di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah sebesar -0,0568. Nilai negatif pada SRP menunjukkan bahwa divergensi umumnya terjadi karena adanya distorsi kebijakan. Nilai SRP -0,0568 berarti kebijakan pemerintah menurunkan keuntungan yang diterima petani sebesar 5,68% dari keuntungan yang sesungguhnya diterima pada harga sosial.

Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas terhadap koefisien PCR digunakan untuk menganalisis perubahan keunggulan kompetitif terhadap berbagai perubahan input maupun output pada harga privat. Variabel PCR dianalisis sebesar satu persen dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis sensitivitas PCR usahatani padi di Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah.

Uraian	PCR	Perubahan PCR	Elastisitas PCR
Nilai awal	0,46347		
Harga output	0,45773	- 0,00573	1.2518
Input Tradable (IT)			
Benih	0,46358	0,00012	0,0254
Urea	0,46366	0.00020	0,0422
TSP	0,46363	0.00017	0,0365
KCL	0,46377	0.00031	0,0659
Biaya Obat-obatan	0,46385	0.00038	0,0827
Total Input Tradable	0,46464	0.00117	0.2527
Input Non Tradable (INT)			
Pupuk kandang	0,46369	0.00023	0,0493
Sewa lahan	0,46434	0.00088	0,1886
Tenaga kerja	0,46548	0.00202	0,4331
Penyusutan	0,46390	0.00043	0,0934
Bajak	0,46405	0.00059	0,1262
Pajak	0,46348	0.00002	0,0037
Transportasi	0,46354	0.00008	0,0167
Bunga	0,46387	0.00040	0,0864
Total Input Non Tradable	0.46810	0.00463	0.9901
Grand Total IT + INT	0,46929	0.00582	1.2403

Keterangan :

Elastisitas PCR <1 berarti tidak peka atau inelastis

Elastisitas PCR >1 berarti peka atau elastis

Nilai elastisitas PCR terhadap perubahan harga output sebesar 1,2518, nilai tersebut >1 yang berarti bahwa harga output bersifat elastis atau peka terhadap keunggulan kompetitif. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kenaikan harga output mampu meningkatkan daya saing usahatani padi. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan harga yang ditetapkan pemerintah yang berupa Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dapat meningkatkan pendapatan petani apabila harga pembelian pemerintah disesuaikan dengan kondisi perberasan nasional serta ada lembaga yang menjamin

kebijakan harga tersebut tepat sasaran sehingga tujuan kebijakan harga tersebut dapat tercapai yang pada prinsipnya untuk menstabilkan harga beras. Kebijakan harga yang diatur oleh pihak pemerintah yaitu harga dasar (*floor price*) dan harga tertinggi (*ceiling price*), dimana harga dasar digunakan untuk menjaga agar harga pasar pada saat panen raya tidak mengalami penurunan, sehingga produsen dapat menerima hasil sesuai dengan harga yang telah ditetapkan tersebut sedangkan harga tertinggi ditetapkan untuk melindungi konsumen pada saat musim paceklik. Selain itu kebijakan harga diimplementasikan melalui operasi pasar yang dilaksanakan oleh Bulog selama musim panen untuk menjaga harga dasar dan persediaan nasional.

Nilai elastisitas PCR terhadap perubahan harga benih, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja, penyusutan, bajak, sewa lahan, pajak, transportasi, dan bunga bernilai lebih kecil dari satu. Hal ini berarti bahwa kenaikan harga tersebut akan menyebabkan tingkat keunggulan kompetitif yang semakin berkurang artinya yang tidak peka terhadap perubahan harga.

Nilai DRC sebelum terjadi perubahan sebesar 0,43679. Hal ini berarti usahatani padi memiliki keunggulan komparatif. Adanya kenaikan harga output sebesar satu persen menyebabkan nilai elastisitas DRC menjadi 1,2541 yang artinya memiliki kepekaan terhadap perubahan harga output. Oleh karena itu, upaya menjaga kestabilan harga gabah maka diperlukan kebijakan untuk mendukung kebijakan harga tersebut, selain itu meningkatkan peran Bulog untuk mencapai stabilitas harga gabah pada tingkat yang relatif aman untuk merangsang petani untuk berproduksi. Dimana Bulog memiliki kewenangan untuk melakukan pembelian, penyimpanan, dan penyebaran (distribusi) serta penyaluran gabah dan beras dalam rangka stabilisasi harga pangan untuk menunjang stabilitas ekonomi.

Analisis sensitivitas terhadap koefisien DRC digunakan untuk menganalisis perubahan keunggulan kompetitif terhadap berbagai perubahan input maupun output pada harga privat. Variabel DRC dianalisis sebesar satu persen dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis sensitivitas DRC usahatani padi di Kec.Seputih Raman Kab. Lampung Tengah

Uraian	DRC	Perubahan DRC	Elastisitas DRC
Nilai awal	0,43679		
Harga output	0,43139	- 0.00541	1.2541
Input Tradable			
Benih	0,43689	0.00010	0,0233
Urea	0,43708	0.00029	0,0655
TSP	0,43699	0.00020	0,0451
KCL	0,43698	0.00019	0,0435
Biaya Obat-obatan	0,43712	0.00033	0,0758
Total Input Tradable	0.43790	0.00111	0.2533
Input Non Tradable			
Pupuk kandang	0,43700	0.00021	0,0479
Sewa lahan	0,43760	0.00080	0,1836
Tenaga kerja	0,43864	0.00185	0,4215
Penyusutan	0,43719	0.00040	0,0909
Bajak	0,43733	0.00054	0,1229
Pajak	0,43681	0.00002	0,0036
Transportasi	0,43686	0.00007	0,0162

Tabel 3. lanjutan

Uraian	DRC	Perubahan DRC	Elastisitas DRC
Bunga	0,43728	0.00048	0,1109
Total Input Non Tradable	0.44116	0.00437	0.9901
Grand Total IT + INT	0,44228	0.00549	1,2409

Keterangan :

Elastisitas DRC <1 berarti tidak peka atau inelastis

Elastisitas DRC >1 berarti peka atau elastis

Nilai elastisitas DRC terhadap perubahan harga benih, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja, penyusutan, bajak, sewa lahan, pajak, transportasi, dan bunga bernilai lebih kecil dari satu. Hal ini berarti bahwa kenaikan harga tersebut akan menyebabkan tingkat keunggulan komparatif yang semakin berkurang artinya yang tidak peka terhadap perubahan harga.

Berdasarkan analisis sensitivitas yang di lakukan pada koefisien PCR dan DRC menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif usahatani padi di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah peka atau sensitif terhadap perubahan harga *output* yang terjadi baik pada kondisi harga privat maupun sosialnya. Penurunan harga *output* dikhawatirkan dapat menyebabkan posisi keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif menjadi rendah yang tentunya juga berakibat menurunnya penerimaan yang diperoleh petani.

KESIMPULAN

Usahatani padi di Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam produksi padi sehingga usahatani padi layak untuk terus dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dari nilai PCR (*Private Cost Ratio*) sebesar 0,4635 dan DRC (*Domestic Resource Cost*) sebesar 0,4368. Keunggulan komparatif dan kompetitif pada usahatani padi di Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung peka terhadap perubahan harga output. Kenaikan atau penurunan dari harga output akan mempengaruhi keunggulan komparatif dan kompetitif usahatani padi di Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung.

SARAN

Bagi pemerintah, selaku pembuat kebijakan sebaiknya melakukan survei terhadap kondisi petani pada saat panen raya dan paceklik sehingga sasaran kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) lebih efisien. Selain itu kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) hendaknya diikuti oleh keberadaan lembaga terkait seperti Bulog yang berperan sebagai lembaga yang mampu menstabilkan harga. Bagi Peneliti lain, sebaiknya melakukan penelitian keunggulan komparatif dan kompetitif dalam produksi padi pada berbagai tipe lahan sawah, baik sawah irigasi teknis, sawah irigasi setengah teknis, maupun sawah tadah hujan. Dengan demikian, akan dapat diketahui keunggulan komparatif dan kompetitif dalam produksi padi pada berbagai tipe lahan sawah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. 2003. *Pembangunan Pertanian*. Buku Ajar Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian. Universitas Lampung.
- Bank Indonesia. 2009. Tingkat Inflasi, Suku Bunga, dan Nilai Tukar Uang Periode 2009. <http://www.bi.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. 2009. Ekspor Impor Indonesia Periode 2009. <http://www.bps.go.id>.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung. 2009. *Lampung dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung.
- Badan Pusat Statistik Lampung Tengah. 2009. *Lampung Tengah dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Propinsi Lampung.
- Cahyono, Andi. 2001. *Analisis Penawaran Dan Permintaan Beras Di Propinsi Lampung Dan Kaitannya Dengan Pasar Beras Domestik dan Internasional*. Skripsi. Institut Pertanian Bogor : Bogor.
- Desliana, M. 2005. *Analisis Daya Saing dan Efisiensi Usahatani Padi Organik di Propinsi Lampung*. Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 73 halaman
- Gittinger, J. P. 1993. *Analisis Proyek-Proyek Pertanian; Edisi II*. Diterjemahkan oleh P. Sutomo dan K. Magin. Universitas Indonesia Press. Jakarta, 579 hal.
- Haryono, D., I. Effendi, A.A. Gumilar, D. A. H. Lestari, dan T.R. Basoeki, 1999. *Aspek Ekonomi Penggunaan Benih Padi Unggul di Propinsi Lampung*. JSE. Volume 5. Nomor 1.
- Haryono, D. 1991. *Keunggulan Komparatif dan Dampak Kebijakan Pada Produksi Kedelai, Jagung, dan Ubi Kayu di Propinsi Lampung*. Tesis. Institut Pertanian Bogor.
- Salahuddin, S. 1998. *Kebijakan Peningkatan Produksi Padi Nasional*. Prosiding Seminar : Bandar Lampung.
- Irawan, B. 2002. *Konversi Lahan Sawah : Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan*. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volumen 23 No. 1, Juli 2005. 18 hlm
- Pearson, S., C. Gorsch, dan S. Bachri . 2005. *Aplikasi Policy Analysis Matrix Pada Pertanian Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. 398 halaman.
- Sugiarto, D. Siagian, L.S. Sunarto, dan D.S. Oetomo. 2003. *Teknik Sampling*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta